Jurnal Global Ilmiah
Vol. 3, No. 7, April 2026
ISSN: 3026-5207

Media Sebagai Arena Policy Discourse: Antara Fungsi Informasi Legitimasi dalam Transparansi dan Akuntabilitas Publik Pemerintah Desa

St. Nurfadillah. A*, Taufik Hidayat
Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
Email: nurfadillahast@gmail.com*, famctorytaufik77@gmail.com

Abstrak

Transparansi dan akuntabilitas publik ialah prinsip penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan bukan hanya pada tingkat pemerintahan desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran media sebagai arena policy discourse dalam membingkai transparansi dan akuntabilitas publik pemerintah desa. Latar belakang penelitian ini adalah pentingnya keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban pemerintah desa pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Media tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai ruang diskursif yang membentuk persepsi publik terhadap kebijakan dan kinerja pemerintahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode kajian pustaka (library research). Data diperoleh dari berbagai sumber literatur seperti buku, artikel jurnal ilmiah, serta dokumen akademik yang relevan dengan konsep media, transparansi, dan akuntabilitas publik. Temuan penelitian menunjukkan bahwa media memiliki peran strategis dalam membangun legitimasi kebijakan melalui proses framing informasi yang mempengaruhi pemahaman publik terhadap tata kelola pemerintahan, meskipun pemanfaatannya di tingkat desa masih bersifat satu arah dan belum optimal. Implikasi penelitian ini menekankan perlunya pengembangan media desa yang lebih interaktif dan partisipatif untuk mendorong praktik transparansi dan penguatan public accountability dalam sistem pemerintahan modern.

Kata kunci : *policy discourse;* framing media; transparansi pemerintah; akuntabilitas publik; *governance.*

Abstract

Transparency and public accountability are essential principles in governance, not just at the village level. This study aims to analyze the role of the media as a policy discourse arena in framing transparency and public accountability in village governments. The background of this study is the importance of information disclosure and accountability in village governments following the enactment of Law Number 6 of 2014 concerning Villages. The media not only functions as a conveyor of information but also as a discursive space that shapes public perceptions of government policies and performance. This study uses a descriptive qualitative approach with a library research method. Data were obtained from various literature sources such as books, scientific journal articles, and academic documents relevant to the concepts of media, transparency, and public accountability. The research findings indicate that the media plays a strategic role in building policy legitimacy through the process of framing information that influences public understanding of governance, although its utilization at the village level is still one-way and not optimal. The implications of this study emphasize the need to develop more interactive and participatory village media to encourage transparency practices and strengthen public accountability in the modern government system.

Keywords*: policy discourse; media framing; government transparency; public accountability; governance.*

PENDAHULUAN

Transparansi dan akuntabilitas publik ialah prinsip penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan bukan hanya pada tingkat pemerintahan desa. Penerapan prinsip ini menjadi bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik *(good governance)*, di mana pemerintah dituntut untuk memberikan informasi yang terbuka kepada masyarakat mengenai kebijakan, program, dan penggunaan sumber daya publik (Norta, 2024). Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa

memperoleh kewenangan yang lebih luas dalam mengelola pembangunan serta dana desa, sehingga kebutuhan terhadap transparansi dan akuntabilitas publik menjadi semakin penting (Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan, dan Sistem Pelaporan, t.t.).

Dalam konteks tersebut, media memiliki peran strategis sebagai sarana penyampaian informasi kebijakan kepada masyarakat. Media tidak hanya berfungsi sebagai penyebar informasi, tetapi juga dapat menjadi ruang diskursus kebijakan *(policy discourse)* yang memungkinkan masyarakat memahami dan menilai kebijakan pemerintah. Melalui media, berbagai informasi terkait program pembangunan, kegiatan pemerintahan, dan penggunaan anggaran desa dapat dipublikasikan secara lebih luas kepada publik. Namun demikian, media juga dapat berfungsi sebagai sarana legitimasi pemerintah dalam membangun citra positif di hadapan masyarakat. Informasi yang disampaikan melalui media dapat membentuk persepsi publik terhadap kinerja pemerintah desa, baik dalam bentuk dukungan maupun kritik. Oleh karena itu, penting untuk melihat bagaimana media berperan tidak hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai arena pembentukan legitimasi kebijakan (Gultom et al., 2025). Pendekatan interpretatif dalam studi kebijakan digunakan untuk memahami proses pembuatan kebijakan secara lebih kritis, tidak hanya dari aspek teknis tetapi juga dari makna sosial dan politik yang ada di dalamnya. Pendekatan ini melihat bahwa kebijakan publik terbentuk melalui interpretasi, pengalaman, dan interaksi para aktor dalam menghadapi berbagai permasalahan masyarakat (Affandi, 2025). Menurut Maarten A. Hajer dan Hendrik Wagenaar, realitas sosial dan politik tidak bersifat mutlak, tetapi merupakan hasil konstruksi makna yang dibentuk melalui perspektif dan pengalaman para aktor kebijakan. Oleh karena itu, pendekatan interpretatif penting untuk memahami bagaimana kebijakan dipahami, dijalankan (Affandi, 2025), dan dimaknai oleh masyarakat maupun pemerintah (Van Hulst et al., 2025).

Desa Goarie di Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng merupakan salah satu desa yang memanfaatkan media informasi melalui platform website yang disediakan untuk menyampaikan berbagai kegiatan dan kebijakan pemerintah desa kepada masyarakat. Melalui publikasi informasi tersebut, pemerintah desa berupaya meningkatkan keterbukaan informasi public (Maryanti et al., 2022). Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran media sebagai *arena policy discourse* antara fungsi informasi dan legitimasi dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas publik pemerintah desa. Berdasarkan fakta di lapangan, ditemukan informasi bahwa penyaluran bantuan dari Dinas Pertanian tidak sepenuhnya tersalurkan kepada setiap anggota kelompok tani melainkan hanya berakhir di tangan ketua kelompok tani untuk dikelola sendiri (Didi, 2023; Ibrahim, 2025; Khabib, 2023). Selanjutnya yang menjadi masalah kedua yaitu mengenai permohonan permintaan bantuan oleh kelompok tani di Desa Goarie kepada Dinas Pertanian Kabupaten Soppeng. Di lapangan kerap ditemukan adanya nama-nama pemohon yang tidak terdaftar sebagai anggota kelompok. Hal ini dapat menimbulkan masalah pada saat penyusunan laporan pertanggungjawaban kegiatan kelompok tani. Selanjutnya mengacu pada salah satu tugas pokok penyuluh yakni identifikasi potensi wilayah, penyuluh diharuskan mengunjungi satu persatu wilayah. Hal ini menjadi kendala tersendiri bagi penyuluh terlebih jika penyuluh tidak terlalu mengenal daerah tersebut (Yusuf & Alfiana, t.t.).

Transparansi merupakan salah satu prinsip fundamental dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan desa yang baik. Prinsip ini berkaitan dengan keterbukaan informasi yang memungkinkan masyarakat memperoleh akses terhadap berbagai proses pengelolaan dana

publik, khususnya dana desa. Agus Hadi Wibowo, S.P. Hadi, dan Purnaweni (2018) menyatakan bahwa transparansi memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengetahui serta memahami proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban penggunaan anggaran desa. Keterbukaan tersebut menjadi bagian penting dalam mendorong partisipasi masyarakat serta memperkuat pengawasan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Lebih lanjut, Hermawan (2023) menjelaskan bahwa transparansi dalam sektor publik ditandai oleh tersedianya informasi dan dokumen yang mudah diakses oleh masyarakat serta adanya keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Sementara itu, Haikal (2022) mengemukakan bahwa transparansi dapat diukur melalui beberapa indikator, antara lain kejelasan informasi, kemudahan akses terhadap informasi publik, serta keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan. Dalam konteks pengelolaan keuangan desa, transparansi tidak hanya berfungsi sebagai instrumen kontrol sosial, tetapi juga sebagai bentuk pemenuhan hak masyarakat untuk mengetahui dan mengawasi penggunaan dana desa secara terbuka. Di sisi lain, akuntabilitas merujuk pada kewajiban aparatur pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan setiap pelaksanaan program dan penggunaan sumber daya publik kepada masyarakat. Menurut Mardiasmo (2018), akuntabilitas mencerminkan tanggung jawab pemerintah dalam menjelaskan dan mempertanggungjawabkan kinerja organisasi secara hukum maupun moral. Dalam praktik pengelolaan keuangan desa, akuntabilitas diwujudkan melalui penyusunan laporan pertanggungjawaban yang transparan serta pelaksanaan evaluasi dan audit secara berkala. Selain itu, Jumame (2020) menegaskan bahwa akuntabilitas menuntut adanya keterbukaan dalam penggunaan anggaran, termasuk kejelasan tujuan program (Ra'is & Rini, 2024), realisasi kegiatan, serta efektivitas penggunaan anggaran. Penerapan prinsip akuntabilitas secara konsisten diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa serta mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa secara berkelanjutan (Pengaruh Transparansi et al., 2025).

Policy Discours ialah sebuah penelitian kebijakan publik selama bertahun-tahun didominasi oleh pendekatan rasional yang melihat kebijakan sebagai hasil dari proses analisis teknis dan pengambilan keputusan yang logis. Namun dalam kenyataannya, proses kebijakan jauh lebih kompleks karena dipengaruhi oleh bahasa, interpretasi, dan cara aktor kebijakan memahami suatu masalah. Oleh karena itu, Hajer memperkenalkan pendekatan analisis wacana (*discourse analysis*) sebagai cara untuk memahami bagaimana makna suatu masalah kebijakan dibentuk melalui komunikasi dan interaksi social (Desisonia, 2024; Jannah, 2025).

Pendekatan *policy discourse* menekankan bahwa kebijakan publik tidak hanya terbentuk melalui analisis rasional dan teknis, tetapi juga melalui bahasa, narasi, dan argumentasi yang digunakan oleh para aktor kebijakan. Menurut Giandomenico Majone, kebijakan publik pada dasarnya dibangun melalui proses persuasi dan penggunaan bahasa untuk meyakinkan publik maupun pengambil keputusan. Oleh karena itu, kebijakan dapat dipahami sebagai hasil dari konstruksi makna yang terbentuk melalui wacana di ruang publik. Pandangan ini juga diperkuat oleh Laurence Tribe yang mengkritik analisis kebijakan yang terlalu objektif dan teknokratis karena cenderung mengabaikan nilai dan dimensi moral dalam kebijakan. Dengan demikian, pendekatan *policy discourse* digunakan untuk menganalisis bagaimana bahasa, narasi, dan makna membentuk pemahaman serta legitimasi terhadap suatu kebijakan publik (Lasswe & Schoo, t.t.).



Gambar 1 Transparansi, Partisipasi Dan Akuntabilitasi

Menurut Robert N. Entman, framing dapat dipahami melalui dua dimensi utama. Pertama adalah seleksi isu, yaitu proses memilih fakta tertentu dari realitas yang kompleks sehingga hanya sebagian aspek dari suatu peristiwa yang ditampilkan dalam pemberitaan (Hafidli et al., 2023). Dalam proses ini, wartawan menentukan fakta mana yang dimasukkan dan mana yang dikeluarkan dari berita. Kedua adalah penonjolan aspek, yaitu cara wartawan menekankan bagian tertentu dari sebuah fakta melalui pilihan kata, gaya bahasa, atau cara penyajian sehingga aspek tersebut menjadi lebih menonjol dalam pemberitaan. Sederhananya komunikasi massa adalah komunikasi melalui media massa untuk mendapatkan data mengenai akuntabilitas dan transparansi Desa Goarie Kabupaten Soppeng. Media massa terdiri dari media cetak seperti koran dan majalah, media elektronik seperti radio dan televisi dan media baru (new media) seperti web- site/portal berita. Michael W. Gamble dan Teri Kwal Gamble (1986) dalam (Nurudin, 2014) menjelaskan komunikasi massa adalah alat-alat dalam komunikasi yang bisa menyebarkan pesan secara bersamaan dan cepat kepada audience yang luas dan heterogen. Kelebihan media massa dibanding- kan dengan jenis komunikasi lain, media massa dapat menyebarkan pesan pada waktu yang tidak terbatas. Media online disebut juga sebagai cybermedia, internet media, dan new media. Dapat diartikan sebagai media yang tersaji secara online di situs web- site internet (A. S. M. Romli, 2012). Di media online juga menyajikan informasi atau karya jurnalistik seperti artikel, berita, dan feature. Media online di- artikan sebagai media massa yang tersaji di situs website internet.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian library research (studi kepustakaan). Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami dan menginterpretasikan fenomena secara mendalam berdasarkan data non-numerik, sedangkan library research berfokus pada pengumpulan data melalui sumber-sumber literatur yang relevan. Kajian metodologi, penelitian kualitatif merupakan proses untuk memahami fenomena berdasarkan konteks dan makna yang dibangun dari berbagai sumber data. Sementara itu, library research merupakan metode penelitian yang memanfaatkan berbagai literatur seperti buku, jurnal ilmiah, dokumen resmi, dan sumber akademik lainnya sebagai data utama penelitian (Jamaluddin et al., t.t.). Sampel data dipilih secara purposif (purposive sampling) berdasarkan kriteria relevansi topik, kredibilitas sumber (terindeks Scopus atau

Sinta), dan tahun terbit (2015-2025). Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling dengan strategi criterion-based selection, di mana hanya literatur yang secara langsung membahas hubungan antara media, transparansi, dan akuntabilitas publik pemerintah desa yang diikutsertakan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis wacana kritis dengan mengacu pada model yang dikembangkan oleh Norman Fairclough. Menurut Fairclough (dalam Eriyanto, 2011), analisis wacana terdiri dari tiga dimensi yang saling terhubung. Pertama, dimensi analisis teks (deskripsi) yang menitikberatkan pada aspek linguistik, seperti struktur bahasa dan pemilihan kata dalam teks berita. Kedua, dimensi praktik wacana (interpretasi), yang mengkaji bagaimana proses produksi dan konsumsi teks berlangsung. Ketiga, dimensi praktik sosial (eksplanasi), yang berfokus pada hubungan antara teks dengan konteks sosial, termasuk ideologi, struktur sosial, serta relasi kekuasaan yang melatarbelakanginya (Agustriani & Hamdani, 2025).

HASIL DAN PEMBAHASAAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa website Desa Goarie berfungsi sebagai media informasi, transparansi, dan legitimasi kebijakan desa. Website tersebut menyediakan berbagai fitur seperti profil desa, berita kegiatan, serta transparansi APBDes yang dapat diakses oleh masyarakat. Dalam perspektif policy discourse, media desa tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membentuk narasi kebijakan yang menguatkan legitimasi pemerintah desa. Namun demikian, penggunaan media masih bersifat satu arah dan belum sepenuhnya mendorong partisipasi publik dalam proses akuntabilitas.

Media digital berupa website desa seperti Website Desa Goarie menjadi sarana utama dalam menyampaikan informasi publik kepada masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, website desa berfungsi sebagai media informasi yang menyediakan data pemerintahan desa secara terbuka. Berdasarkan hasil observasi, website Desa Goarie memuat beberapa fitur utama seperti:

1. Profil desa
2. Berita kegiatan desa
3. Transparansi APBDes
4. Infografis dan data pembangunan

Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah desa telah memanfaatkan media sebagai sarana penyebaran informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Website tersebut juga menyediakan informasi terkait kegiatan seperti penyaluran bantuan, pelatihan, dan program pembangunan desa. Dalam perspektif *policy discourse* (Hajer), media tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membentuk cara masyarakat memahami kebijakan desa. Website desa menjadi ruang diskursus yang mengarahkan publik pada narasi “desa transparan dan aktif”.

Website Desa Goarie juga menyediakan fitur transparansi anggaran (APBDes) yang menampilkan pendapatan dan belanja desa secara terbuka kepada masyarakat .
Fitur ini mencerminkan implementasi prinsip:

1. Transparansi fiskal
2. Keterbukaan informasi publik
3. Akuntabilitas administratif

Penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa:

1. Transparansi pengelolaan dana desa di Goarie sudah sesuai indikator
2. Namun masih terdapat keterbatasan dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban secara langsung ke masyarakat analisis Media website berfungsi sebagai alat legitimasi bahwa pemerintah desa telah transparan. Namun, transparansi yang ditampilkan masih bersifat:
3. satu arah (*top-down)*
4. berbasis publikasi, bukan partisipasi (Yusuf & Alfiana, t.t.).

Pelaksanaan berbagai kegiatan di tingkat desa pada umumnya bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) yang dijalankan oleh tim pelaksana yang dibentuk oleh pemerintah desa dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Dalam konteks tersebut, pemerintah desa dituntut untuk bersikap transparan terhadap penggunaan anggaran dalam pelaksanaan program ADD (Asyriah et al., 2022). Oleh karena itu, keterbukaan tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat desa sebagai pelaksana, tetapi juga membutuhkan keterlibatan seluruh masyarakat setempat. Keterbukaan ini menjadi salah satu indikator keberhasilan tim pelaksana Desa Goarie, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng dalam mendukung transparansi informasi terkait program ADD. Salah satu bentuk konkret transparansi yang dapat dilakukan adalah dengan menyediakan papan informasi yang memuat proses, jadwal pelaksanaan, serta rincian kegiatan fisik yang sedang atau akan dilaksanakan di lapangan (Ra'is & Rini, 2024).



Gambar 2 Website Desa

Berdasarkan Peraturan Bupati Soppeng, Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Goarie tahun 2025 sebesar Rp1.401.686.326 yang disalurkan dalam tiga tahap, yaitu tahap awal, tahap I, dan tahap II. Pola penyaluran bertahap ini bertujuan untuk memastikan efektivitas penggunaan anggaran serta mendukung keberlangsungan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa secara berkelanjutan (Ramadhani et al., 2025).
tetapi jika dilihat data sebelum-sebelumnya anggaran dana desa ditahun 2020-2021

Tabel 1 anggaran dana desa ditahun 2020-2021

Tahun	anggaran	Realisasi	Selisih
2020	**1,231,770,556.00**	**1,195,989,496.00**	**35,281,060.00**
2021	**1,272,884,762.00**	**1,173,884,762.00**	**99,000,000.00**

Sumber: Kantor Desa Goarie, 2022 Dari tabel di atas, maka dapat disimpulkan dari lima tahun terakhir anggaran yang paling banyak terserap di Desa Goarie Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng pada tahun 2020.
Jadi jumlah keseluruhan anggaran dari 2 tahun itu dinyatakan :

Tabel 2 jumlah keseluruhan anggaran dari 2 tahun

Jumlah	anggaran	Realisasi	Selisih
>	**2,504,655,318**	**2,369,874,258**	**134,281,060**

Akuntabilitas dalam perencanaan di Desa Goarie dapat dipahami sebagai ukuran yang menunjukkan sejauh mana penyelenggaraan pelayanan publik mampu memenuhi standar dan norma eksternal yang ditetapkan oleh para pemangku kepentingan. Dengan demikian, setiap tahapan dalam program perencanaan harus mencerminkan prinsip akuntabilitas yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan (Radianti & Sofyaningrum, 2026).

Pertama, dalam proses pengambilan keputusan, setiap keputusan harus didokumentasikan secara tertulis dan dapat diakses oleh masyarakat yang membutuhkan sebagai bentuk transparansi. Kedua, keputusan yang dihasilkan harus memenuhi standar etika serta nilai-nilai yang berlaku, sekaligus sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang baik.

Ketiga, pada tahap sosialisasi kebijakan, akuntabilitas perencanaan diwujudkan melalui penyebarluasan informasi terkait keputusan yang telah diambil. Informasi tersebut dapat disampaikan melalui media massa maupun komunikasi personal agar dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat (Ra'is & Rini, 2024).

Dalam upaya menilai akuntabilitas perencanaan, salah satu indikator penting adalah ketersediaan dan keterbukaan data realisasi anggaran desa. Namun, berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan peneliti, data realisasi anggaran Desa Goarie, Kabupaten Soppeng untuk tahun 2022–2024 belum ditemukan pada media publik yang tersedia, baik melalui website resmi anggaran desa maupun kanal informasi lainnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa aksesibilitas informasi keuangan desa masih terbatas. Ketiadaan data tersebut menjadi kendala dalam proses penelitian, khususnya dalam melakukan analisis komparatif antara perencanaan dan realisasi anggaran. Padahal, transparansi data realisasi anggaran merupakan bagian penting dalam mewujudkan prinsip akuntabilitas publik. Tanpa adanya data tersebut, masyarakat maupun peneliti mengalami kesulitan dalam menilai sejauh mana program yang telah direncanakan benar-benar dilaksanakan sesuai dengan anggaran yang ditetapkan. Selain itu, keterbatasan akses informasi ini juga mengindikasikan bahwa mekanisme publikasi dan diseminasi informasi di tingkat desa belum berjalan secara optimal. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya pemanfaatan teknologi informasi, atau belum adanya kewajiban yang ditegakkan secara konsisten terkait

publikasi data anggaran desa. Dengan demikian, kendala dalam menemukan data realisasi anggaran ini tidak hanya berdampak pada proses penelitian, tetapi juga mencerminkan masih perlunya peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih serius dari pemerintah desa untuk menyediakan dan memperbarui informasi anggaran secara terbuka dan mudah diakses oleh publik.

KESIMPULAN

Media desa di Desa Goarie telah dimanfaatkan sebagai sarana penyampaian informasi publik, khususnya melalui website desa yang memuat berbagai kegiatan dan program pembangunan. Hal ini menunjukkan adanya upaya pemerintah desa dalam menyediakan akses informasi kepada masyarakat sebagai bagian dari keterbukaan informasi publik. Dalam aspek transparansi anggaran, pemerintah desa telah menunjukkan upaya keterbukaan melalui publikasi program yang bersumber dari Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD). Namun, informasi yang disajikan masih terbatas dan belum memuat rincian anggaran secara lengkap, sehingga transparansi yang dilakukan cenderung bersifat administratif. Dalam perspektif policy discourse, media desa tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai sarana pembentukan narasi kebijakan. Konten yang ditampilkan lebih banyak menonjolkan kegiatan dan keberhasilan program pemerintah desa, yang berkontribusi dalam membangun legitimasi di mata masyarakat.

Meskipun demikian, peran media desa dalam mendorong akuntabilitas publik belum optimal. Hal ini terlihat dari minimnya ruang partisipasi masyarakat serta sifat komunikasi yang masih satu arah. Oleh karena itu, pengembangan media desa yang lebih interaktif dan terbuka diperlukan untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas publik yang lebih partisipatif.

REFERENSI

Affandi, C. M. (2025). Transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa sebagai upaya mewujudkan pengelolaan alokasi dana desa yang efektif. *Jurnal Riset Mahasiswa Ekonomi (RITMIK), 7*(4), 336–347.

Agustriani, D., & Hamdani, A. (2025). Representation of leaders in the media with critical discourse analysis of Dedi Mulyadi's policy. *Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, 9*(1), 93–109. https://doi.org/10.21009/AKSIS

Akuntabilitas, Pengaruh, Transparansi dan, & Sistem Pelaporan. (n.d.). Pengaruh akuntabilitas, transparansi dan sistem pelaporan terhadap kinerja pemerintah.

Asyriah, N., et al. (2022). Tapis: Jurnal penelitian ilmiah. *Jurnal Penelitian Ilmiah, 5*(2), 166–172.

Desisonia, L. H. (2024). *Konstruksi makna internasionalisasi (Studi fenomenologi pada performa budaya unit pelaksana teknis pengembangan kerjasama dan layanan internasional Universitas Lampung)*. Universitas Lampung.

Didi, K. (2023). *Peran kelompok tani dalam pemberdayaan masyarakat tani untuk meningkatkan kesejahteraan petani Desa Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur dalam perspektif ekonomi Islam tahun 2023*. UIN Raden Intan Lampung.

Gultom, Y. C. V., Safitri, N. J., Muhammad, M., & Doho, Y. D. B. (2025). Peran media massa dalam membentuk opini publik terhadap kebijakan pemerintah. *LOKAKOTA: Jurnal Kajian Komunikasi, 1*(1), 61–70.

Hafidli, M. N., et al. (2023). Analisis framing model Robert Entman tentang kasus Kanjuruhan di Detik.com dan BBC News. *JIS: Jurnal Ilmu Sosial, 3*(1).

Hulst, M. van, et al. (2025). Discourse, framing and narrative: Three ways of doing critical, interpretive policy analysis. *Critical Policy Studies, 19*(1), 74–96. https://doi.org/10.1080/19460171.2024.2326936

Ibrahim, S. (2025). *Peran pemerintah daerah dalam melakukan penguatan kelompok tani di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap*. IAIN Parepare.

Jamaluddin, M., Rahmatullah, A., & Farid, M. (n.d.). *Library research methodology in education: Fundamental*.

Jannah, A. Z. (2025). *Wacana kebijakan pencatatan perkawinan bagi semua agama di kantor urusan agama: Analisis konten media sosial*. Universitas Islam Indonesia.

Khabib, A. K. (2023). *Peranan gabungan kelompok tani (Gapoktan) dalam upaya meningkatkan pendapatan anggota tani (Studi kasus Gapoktan Tanimulya Desa Jatimulyo Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen)*. UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri.

Lasswe, Y., & Schoo, L. (n.d.). *Discourse analysis and the study of policy making*.

Maryanti, S., Komariah, N., & Rodiah, S. (2022). Diseminasi informasi publik oleh pejabat pengelola informasi dan dokumentasi Kota Banjar sebagai upaya keterbukaan informasi publik. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 8*(3), 517–533.

Norta. (2024). Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa berbasis web di mata masyarakat Desa Parit Baru. *Jurnal Kajian Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi UNTAN (KIAFE), 2*(3), 1–14.

Ra'is, D. U., & Rini, Y. T. (2024). Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa: Analisa tren pengelolaan dana desa 2016–2024. *JADMENT: Journal of Administration and Development, 1*(2), 89–102. https://doi.org/10.62085/jadment.v1i2.13

Radianti, R. A., & Sofyaningrum, R. (2026). The dynamics of power in the political discourse of Najwa Shihab and Prabowo Subianto on the police bill (RUU Polri). *TOFEDU: The Future of Education Journal, 5*(1), 1066–1077.

Ramadhani, A., et al. (2025). Transparansi dan akuntabilitas dana desa dalam perspektif Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). *JUTIN: Jurnal Teknik Industri Terintegrasi, 8*(1), 1458–1463.

Transparansi, Pengaruh, et al. (2025). *Balance: Jurnal Akuntansi dan Manajemen, 4*(2), 997–1008.

Yusuf, F., & Alfiana, A. F. (n.d.). Analisis dan desain sistem informasi pelaporan kegiatan kelompok tani dan pemetaan wilayah potensial Desa Goarie Kabupaten Soppeng, 1–6.